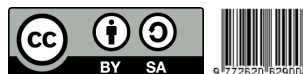


Ethnocultural Analysis of the Phenomenon of Diversity Education in the Dimension of Pluralism

Journal of Islamic Studies, Vol. 3 No. 2, 2020, pp: 47-60
<http://journal.islamicateinstitute.co.id/index.php/jois>
DOI: <https://doi.org/10.32506/jois.v3i2.634>



Redmon Windu Gumati

STIT At-Taqwa Ciparay Bandung, Indonesia

Email: redmon.windu@gmail.com

Received: July 2020 | Accepted: September | Published: December 2020

Abstract

The Unitary State of the Republic of Indonesia has a diversity of cultures (ethnocultural), many ethnic groups, countries, religions, and different customs. This diversity sometimes and disputes in the name of religion. The spread of terrorist acts, arson, destruction of facilities and places of worship, suspicion of mutual suspicions between religious communities is evidence of the existence of these conflicts and conflicts. There have been many attempts to overcome this problem, one of which is through efforts for peace and friendship, through new strategies that are more effective and relevant. In order to gain success for the realization of the noble goal, namely peace and eternal brotherhood between people who in reality do have different religions and faiths, it is necessary to have the courage to invite them to make changes in the field of education, primarily through its diversity-based curriculum (pluralism). Through a curriculum like this, it is possible to uncover the respective religious theologies that have tended to be presented exclusively and dogmatically—a faith that usually only claims that only religion can build worldly prosperity and lead people to heaven. There are only one door and room of heaven that cannot be opened and entered except by the religion he embraces. Even though such a theology, we must admit, is very worrying and can disturb the harmony of the community of faiths. All people were required to depend on each other and share their destiny to create lasting peace.

Keywords: *ethnocultural, Islam, pluralism.*

INTRODUCTION

Keragaman budaya (etnokultural) dalam konteks studi ini lebih banyak diartikan sebagai sebuah paham tentang perbedaan dalam masyarakat yang multikultur. Agama dan umat beragama merupakan bagian dari keberadaan keragaman kebudayaan (etnokultural), sesuatu yang harus dijaga dan dihormati keberadaannya. Hal ini merujuk kepada konvensi UNESCO 2005 (Convention on The Protection and Promotion of The Diversity of Cultural Expressions) (Basri, 1991, hlm. 14). Oleh karenanya, wujud menjaga dan menghormati keragaman budaya (etnokultural) dalam agama dan umat beragama adalah dengan menselaraskannya dengan kearifan-kearifan lokal, yang dengan senantiasa menerangkan dan menekankan akan arti pentingnya kerukunan, kerjasama dan dialog antar umat beragama. Dalam hal ini, ada istilah yang dipopulerkan oleh John Lyden, seorang ahli agama-agama: “what should one think about religions other than one’s own?”. Yang artinya: “Apa yang harus dipikirkan oleh seorang umat beragama terhadap umat beragama lain?”. “Apakah sebagai seorang musuh atau sebagai seorang sahabat?” (Rachman, 2004, hlm. 45).

Telah banyak usaha yang telah dilakukan oleh para ilmuwan dan agamawan demi terciptanya hubungan yang mesra dan harmonis di antara umat beragama, baik melalui tulisan-tulisan, seperti buku, majalah, jurnal bahkan melalui seminar, workshop, serta mimbar-mimbar khutbah. Meskipun nampaknya, saran-saran mereka belum memiliki efek yang begitu menggembirakan. Tetapi, disinilah letak pentingnya bagi umat agama untuk kembali mendefenisikan dirinya ditengah agama-agama lain (Shihab, 2002, hlm. 23).

Disamping itu, upaya untuk bisa memperoleh pemahaman yang sejuk dan bisa menganggap orang lain sebagai teman dan sahabat (partner) dalam menuju Tuhan, di samping harus menampilkan teologi yang inklusif dan ramah, juga harus memasuki dialog antar agama, dengan mencoba saling memahami, bahwa Tuhan mempunyai jalan penyelamatan atas Keragaman budaya (etnokultural) tersebut (Shihab, 2002, hlm. 23).

Dalam konteks ini, tentu saja pengajaran pendidikan dalam Islam yang diajarkan di Sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Madrasah-madrasah, Surow, dan Langgar harus memuat kurikulum berbasis keanekaragaman. Kurikulum yang mestilah mencakup subyek seperti: PPKN, Pancasila, Toleransi, Aqidah Inklusif, Fiqih Muqarran, Perbandingan Agama, Pendidikan Anti Korupsi, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokrasi dan pluralitas; kemanusiaan universal, deradikalisme, dan subjek-subjek lain yang relevan serta tema-tema tentang keragaman budaya (etnokultural).

Sebuah kurikulum yang mampu menghantarkan peserta didik untuk melakukan dialog antaragama dan mampu memasuki persoalan-persoalan teologis dan melibatkan iman. Karena dialog yang sejati mustahil dilakukan tanpa memasuki persoalan-persoalan teologis dan melibatkan iman. Sehingga pada akhirnya setiap umat beragama akan mampu melintas (passing over), melintas dari satu budaya kepada budaya lain, dari satu cara hidup kepada cara hidup lain, dari satu agama kepada agama lain. Istilah yang dipopulerkan oleh John S. Dunne, seorang sosiolog Amerika. Dengan tambahan penjelasan bahwa setelah passing over (mampu melintas), akan diikuti oleh proses yang sama dan berlawanan yang kita sebut *coming back* (mampu kembali). Artinya umat beragama yang mampu melintas dari satu budaya kepada budaya lain, dari satu cara hidup kepada cara hidup lain, dari satu agama kepada agama lain, akan kembali dengan wawasannya yang baru, kepada budaya sendiri, cara hidupnya sendiri, dan agamanya sendiri (Durkheim dkk., 1961, hlm. 67).

Dengan model kurikulum tersebut, diharapkan pendidikan agama yang diberikan kepada siswa saat ini, akan menciptakan suatu pemahaman yang tunggal, melainkan pemahaman yang dapat menunjang proses siswa menjadi manusia yang demokratis, pluralis dan menekankan penghayatan hidup, serta dapat refleksi untuk menjadi manusia yang utuh.

Perlunya memperbaharui, mereformasi, dan mengembangkan kurikulum pendidikan agama yang berbasis keanekaragaman tersebut, dengan suatu pertimbangan bahwa kurikulum dan metode merupakan elemen penting dalam proses belajar mengajar. Berhasil dan tidaknya suatu tujuan pendidikan tergantung kurikulum yang dipersiapkan dan metode yang digunakannya. Tidak relevannya kurikulum dan metode yang dikembangkan di suatu sekolah dengan realitas kehidupan yang dialami oleh siswa, menyebabkan siswa teraliniasi dari lingkungannya alias tidak bisa peka terhadap perkembangan yang terjadi disekitarnya. Hal ini berarti, dalam konteks globalisasi, sekolah tersebut telah gagal untuk mengantarkan peserta didiknya untuk menjadi anak yang cerdas, tanggap dan dapat bersaing dipasaran bebas (Hasan, 2000).

Selain itu, pentingnya memperbaharui, mereformasi, dan mengembangkan kurikulum pendidikan agama, dengan menampilkan wajah Islam toleran, dapat dijelaskan dari sudut pandang bahwa kurikulum adalah bangunan (construct) yang dibangun untuk mentransfer apa yang sudah terjadi di masa lalu kepada generasi berikutnya untuk dilestarikan, diteruskan atau dikembangkan. Atau pandangan bahwa posisi kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa depan dimana kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan berbagai rencana pengembangan dan pembangunan bangsa dijadikan dasar untuk mengembangkan kehidupan masa depan (Barnadib, 1994, hlm. 65).

Dengan bentuk kurikulum seperti itulah sangat memungkinkan untuk mengajarkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang humanis, demokratis dan berkeadilan kepada peserta didik. Sebuah prinsip-prinsip ajaran Islam yang sangat relevan untuk memasuki masa depan dunia yang bangun di atas Keragaman budaya (etnokultural).

METHOD

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu sebuah pendekatan penelitian yang menggunakan diskripsi-deskripsi baik secara lisan maupun tulisan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Djam'an Satori (2011, hlm, 23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya

Sebagaimana Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif deskriptif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan data yang dapat diamati.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dokumentatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011, hlm. 73), Jenis Penelitian dokumentatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam proses penelitian ini adalah menggunakan dokumentasi. Menurut Sugiyono, suatu penelitian bila dilihat dari sumber data yang digunakan, terdapat dua macam, yaitu: (1), sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya yang ditulis langsung oleh tokoh yang diteliti. Dalam hal ini adalah Analisis Etnokultural Terhadap Fenomena Pendidikan Agama dalam Dimensi Pluralisme. (2), sumber data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen, yaitu karya-karya yang secara intelektual tidak terjadi kontak, tetapi ada kesamaan tema-tema pemikiran yang dikembangkan.

RESULT AND DISCUSSION

1. Memaknai Keragaman Budaya (Etnokultural) dan Islam Agama Yang Toleran

Keragaman budaya (etnokultural) adalah keniscayaan yang ada di bumi Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok sukubangsa yang ada di daerah tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat peradaban kelompok-kelompok sukubangsa dan masyarakat di Indonesia yang berbeda. Pertemuan-pertemuan dengan kebudayaan luar juga mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan yang ada di Indonesia sehingga menambah ragamnya jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian juga berkembang dan meluasnya agama-agama besar di Indonesia turut mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia sehingga mencerminkan kebudayaan agama tertentu.

Tetapi, dalam kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang seperti itu, ada sebagian kalangan

yang enggan menjelaskan dan mewacanakannya realitas keragaman budaya (etnokultural) tersebut, bahkan menutup mata dan telinganya. Bahkan ada kalangan yang menpersepsikannya negatif, bahwa ia berasal dari Barat. Tetapi kalau kemudian paham ini, mampu memberikan kontribusi positif bagi terciptanya persahabatan dan perdamaian bagi masyarakat agama, kenapa harus ditampik. Dengan begitu, dapatlah dikatakan bahwa sesuatu yang datang dari Barat ternyata tidak selamanya jelek dan bertentangan dengan moral dan agama. Semuanya sebenarnya tergantung bagaimana cara menyikapi dan mempergunakannya.

Dalam konteks keragaman budaya (etnokultural) ini, Islam menampilkan wajah agama secara santun dan ramah. Islam bahkan memerintahkan umat Islam untuk dapat berinteraksi terutama dengan agama lain, semisal agama Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi. Islam dapat menggali nilai-nilai keagamaan melalui diskusi dan debat intelektual, serta dialog teologis secara bersama-sama dan dengan cara yang sebaik-baiknya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam al-Qur'an, Surat al-Hujurat (49), ayat 16, yang artinya : "dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan Katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan Kami dan Tuhanmu adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri".

Dialog tersebut, tentu saja tanpa harus menimbulkan prejudice atau kecurigaan di antara mereka. Azyumardi Azra, (1998, hlm. 93). Islam memandang bahwa keragaman budaya (etnokultural) adalah salah satu kenyataan objektif komunitas umat manusia, sejenis hukum Allah atau Sunnah Allah, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Qur'an, Surat Al-Hujray (49), ayat 13, yang artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

Kalu kita membaca dari ayat tersebut, secara kritis dan penuh keterbukaan, pastilah kita akan menemukan suatu kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sebenarnya secara tegas telah menyatakan bahwa ada kemajemukan di muka bumi ini. Perbedaan laki-laki dan perempuan, perbedaan suku bangsa adalah realitas keragaman budaya (etnokultural) yang harus dipandang secara positif dan optimis. Perbedaan itu, harus diterima sebagai kenyataan dan berbuat sebaik mungkin atas dasar kenyataan itu. Bahkan kita disuruh untuk menjadikan keragaman budaya (etnokultural) tersebut sebagai instrumen untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan jalan mengadakan interaksi sosial antara individu, baik dalam konteks pribadi atau bangsa.

Konsep unity in diversity dalam Islam telah diakui keabsahannya dalam kehidupan ini. Untuk mendukung pernyataan ini, kita dapat melacak kebenarannya dalam perjalanan sejarah yang telah ditunjukkan oleh al-Qur'an, bahwa Islam telah memberi karakter positif kepada komunitas non-Muslim, Ini bisa dilihat, misalnya, dari berbagai istilah eufemisme, mulai dari ahl al-kitab, shabi'in ahl al-kitab, *dīn Ibrahim* (agama *dīnan ḥanīfan*). Dan secara spesifik, Islam malahan mengilustrasikan karakter para pemuka agama Kristen sebagai manusia dengan sifat rendah hati (*lā yastakbirūn*), serta pemeluk agama Nasrani sebagai kelompok dengan jalinan emosional (*aqrabahum mawaddatan*) terdekat dengan komunitas Muslim. Prinsip untuk dapat menghargai agama lain dan dapat menjalin persahabatan dan perdamaian. Islam memandang bahwa persoalan kemerdekaan beragama dan keyakinan menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nabi sendiri dilarang untuk memaksa, menunjukkan sikap kekerasan, paksaan, menteror dan menakut-nakuti orang lain untuk masuk Islam. Tugas para Rasul adalah menyampaikan ajaran tentang tauhid ini, serta ajaran tentang keharusan manusia tunduk dan patuh hanya kepada-Nya saja. Dengan kata lain Islam mengajarkan toleransi, menghormati keragaman budaya (etnokultural), mengajarkan paham kemajemukan keagamaan (pluralisme). Hal seperti ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang toleran.

Islam mengajarkan bahwa semua agama itu pada mulanya menganut prinsip yang sama, mengajak kepada satu titik pertemuan yang sama, yaitu: *kalimatun sawā'*. Implikasi dari kalimatun sawa' ini menurut Alqur'an adalah: siapapun dapat memperoleh "keselamatan" asalkan dia beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat baik". Islam tidak mengingkari kasahihan pengalaman transendensi agama lain, malah mengetahui dan bahkan mengakui daya penyelamatan umat agama lain, dalam hubungannya dengan lingkup monoteisme.

Hal itu sejalan dengan ajaran bahwa monoteisme merupakan dogma yang diutamakan dalam Islam. Monoteisme, yakni percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, dipandang jalan untuk keselamatan manusia. Dalam Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Abdulaziz Sachedina dalam bukunya *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, adalah jelas memandang dirinya sebagai mata rantai kritis dalam pengalaman pewahyuan umat manusia, satu jalan universal yang dimaksudkan untuk semua makhluk (Abdulaziz Sachedina, 2002, hlm. 59).

2. Peran Pemerintah dalam Penjaga Keanekaragaman dan Perlunya Pendidikan berbasis Keragaman Budaya (Etnokultural)

Sesungguhnya peran pemerintah dalam konteks menjaga keanekaragaman kebudayaan adalah sangat penting. Dalam konteks ini pemerintah berfungsi sebagai pengayom dan pelindung bagi warganya, sekaligus sebagai penjaga tata hubungan interaksi antar kelompok-kelompok kebudayaan yang ada di Indonesia. Namun sayangnya pemerintah yang kita anggap sebagai pengayom dan pelindung, dilain sisi ternyata tidak mampu untuk memberikan ruang yang cukup bagi semua kelompok-kelompok yang hidup di Indonesia.

Setelah reformasi 1998, muncul kesadaran baru tentang bagaimana menyikapi perbedaan dan keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yaitu kesadaran untuk membangun masyarakat Indonesia yang sifatnya multibudaya, dimana acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multibudaya adalah multibudayaisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. (Parsudi Suparlan, 1999, hlm. 45).

Dengan menyadari bahwa masyarakat kita terdiri dari banyak suku dan beberapa agama, jadi sangat pluralis. Maka, pencarian bentuk pendidikan alternatif mutlak diperlukan. Yaitu suatu bentuk pendidikan yang berusaha menjaga kebudayaan suatu masyarakat dan memindahkannya kepada generasi berikutnya, menumbuhkan akan tata nilai, memupuk persahabatan antara siswa yang beraneka ragam suku, ras, dan agama, mengembangkan sikap saling memahami, serta mengerjakan keterbukaan dan dialog. Bentuk pendidikan seperti inilah yang banyak ditawarkan oleh "banyak ahli" dalam rangka mengantisipasi konflik keagamaan dan menuju perdamaian abadi, yang kemudian terkenal dengan sebutan pendidikan keberagaman budaya (etnokultural education). (Khoirul M. Muqtafa, 2004, hlm. 5).

Banyak sekali literatur mengenai pendidikan tersebut atau sering dikenal orang dengan sebutan "pendidikan multikultural". Namun literatur-literatur tersebut menunjukkan adanya keragaman dalam pengertian istilah. Sleeter Burnet (1991) mengartikan pendidikan multikultural sebagai *any set of proses by which schools work with rather than against oppressed group*. Banks dalam bukunya *Multicultural Education: Historical Development, Dimension, and Practice* (1993) menyatakan bahwa meskipun tidak ada konsensus tentang itu ia berkesimpulan bahwa di antara banyak pengertian tersebut maka yang dominan adalah pengertian pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people of color.

Lebih jelasnya, menariklah kalau kita memperhatikan suatu definisi tentang pendidikan keberagaman budaya (etnokultural education) yaitu suatu pendidikan yang mengandaikan kita untuk membuka visi pada cakrawala yang semakin luas, mampu melintas batas kelompok etnis atau tradisi budaya dan agama kita sehingga kita mampu melihat "kemanusiaan" sebagai sebuah keluarga yang memiliki baik perbedaan maupun kesamaan cita-cita. Inilah pendidikan akan nilai-nilai dasar

kemanusiaan untuk perdamaian, kemerdekaan, dan solidaritas.

Senada dengan itu, Ainurrofiq Dawam menjelaskan definisi pendidikan multikultural sebagai proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya etnis, suku, dan aliran (agama). Pengertian pendidikan multikultural yang demikian, tentu mempunyai implikasi yang sangat luas dalam pendidikan. Karena pendidikan itu sendiri secara umum dipahami sebagai proses tanpa akhir atau proses sepanjang hayat. Dengan demikian, pendidikan multikultural menghendaki penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia darimana pun dia datangnya dan berbudaya apa pun dia. Harapannya, sekilas adalah terciptanya kedamaian yang sejati, keamanan yang tidak dihantui kecemasan, kesejahteraan yang tidak dihantui manipulasi, dan kebahagiaan yang terlepas dari jaring-jaring manipulasi rekayasa sosial (Dawan Ainurrofiq, 2003, hlm. 45).

W. C. Toward Smith (1981, hlm. 75) menyebut pendidikan yang berorientasi pada proses penyadaran yang berwawasan pluralis secara agama sekaligus berwawasan multikultural, seperti itu, dengan sebutan pendidikan keragaman budaya (*etnokultural education*). Menurutnya, pendidikan semacam itu harus dilihat sebagai bagian dari upaya komprehensif mencegah dan menaggulangi konflik etnis agama, radikalisme agama, separatisme, dan integrasi bangsa, sedangkan nilai dasar dari konsep pendidikan ini adalah toleransi.

Memperhatikan beberapa definisi tentang pendidikan keberagaman budaya (*etnokultural education*) tersebut di atas, secara sederhana dapatlah pendidikan keberagaman budaya (*ethnocultural education*) didefinisikan sebagai pendidikan untuk/ tentang keragaman keagamaan dan kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Pendidikan disini, dituntut untuk dapat merespon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok.

3. Kurikulum Pendidikan agama Berbasis Keragaman Budaya (Etnokultural)

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan sarat perkembangan, karena itu perubahan atau perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perbaikan pendidikan pada semua tingkat perlu terus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan. Pemikiran ini mengandung konsekuensi bahwa penyempurnaan atau perbaikan kurikulum pendidikan agama adalah untuk mengantisipasi kebutuhan dan tantangan masa depan dengan diselaraskan terhadap perkembangan kebutuhan dunia usaha atau industri, perkembangan dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Konsep yang sekarang banyak diwacanakan oleh banyak ahli adalah kurikulum pendidikan berbasis pluralisme.

Sebagaimana disebut di atas, bahwa konsep pendidikan keberagaman budaya (*etnokultural education*) adalah pendidikan yang berorientasi pada realitas persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dan umat manusia secara keseluruhan. Pendidikan keberagaman budaya (*etnokultural education*) digagas dengan semangat besar untuk memberikan sebuah model pendidikan yang mampu menjawab tantangan masyarakat pasca modernisme (Philip Robinson, 1986, hlm. 153).

Melihat realitas tersebut, maka disinilah letak pentingnya menggagas pendidikan agama berbasis pluralisme dengan menonjolkan beberapa karakter sebagai berikut; pertama, pendidikan agama harus mempunyai karakter sebagai lembaga pendidikan umum yang bercirikan Islam. Artinya, di samping menonjolkan pendidikannya dengan penguasaan atas ilmu pengetahuan, namun karakter keagamaan juga menjadi bagian integral dan harus dikuasai serta menjadi bagian dari kehidupan siswa sehari-hari. Tentunya, ini masih menjadi pertanyaan, apakah sistem pendidikan seperti ini betul-betul mampu membongkar sakralitas ilmu-ilmu keagamaan dan dikhotomi keilmuan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu keagamaan.

Kedua, Pendidikan agama juga harus mempunyai karakter sebagai pendidikan yang berbasis pada pluralitas. Artinya, bahwa pendidikan yang diberikan kepada siswa tidak menciptakan suatu pemahaman yang tunggal, termasuk di dalamnya juga pemahaman tentang realitas keberagamaan. Kesadaran pluralisme merupakan suatu keniscayaan yang harus disadari oleh setiap peserta didik. Tentunya, kesadaran tersebut tidak lahir begitu saja, namun mengalami proses yang sangat panjang, sebagai realitas pemahaman yang komprehensif dalam melihat suatu fenomena.

Ketiga, Pendidikan agama harus mempunyai karakter sebagai lembaga pendidikan yang menghidupkan sistem demokrasi dalam pendidikan. Sistem pendidikan yang memberikan keluasaan pada siswa untuk mengekspresikan pendapatnya secara bertanggung jawab. Sekolah memfasilitasi adanya “mimbar bebas”, dengan memberikan kesempatan kepada semua civitas untuk berbicara atau mengkritik tentang apa saja, asal bertanggung jawab. Tentunya, sistem demokrasi ini akan memberikan pendidikan pada siswa tentang realitas sosial yang mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeda. Di sisi yang lain, akan membudayakan “reasoning” bagi civitas di lembaga pendidikan agama.

Perlunya membentuk pendidikan agama berbasis pluralisme tersebut, sekali lagi merupakan suatu inisiasi yang lahir dari realitas sejarah pendidikan khususnya di Indonesia yang dianggap gagal dalam membangun citra kemanusiaan. Dimana umumnya, pendidikan umum hanya mencetak orang-orang yang pintar namun tidak mempunyai integritas keilmuan dan akhlak ilmunan. Ini yang kemudian melahirkan para koruptor yang justru menjadi penyakit dan menyengsarakan bangsa ini. Di satu sisi, pendidikan agama yang ada hanya menciptakan ahli agama yang cara berpikirnya parsial dan sempit. Akhirnya, semakin banyak orang pintar ilmu agama semakin kuat pertentangan dan konflik dalam kehidupan. Inilah sistem pendidikan yang gagal dalam menciptakan citra kemanusiaan.

Untuk merealisasikan cita-cita pendidikan yang mencerdaskan seperti tersebut, lembaga pendidikan agama perlu menerapkan sistem pengajaran yang berorientasi pada penanaman kesadaran pluralisme dalam kehidupan. Adapun beberapa program pendidikan yang sangat strategis dalam menumbuhkan kesadaran pluralisme adalah: pendidikan sekolah harus membekali para mahasiswa atau peserta didik dengan kerangka (*frame work*) yang memungkinkannya menyusun dan memahami pengetahuan yang diperoleh dari lingkungannya.

Karena masyarakat kita majemuk, maka kurikulum pendidikan agama yang ideal adalah kurikulum yang dapat menunjang proses siswa menjadi manusia yang demokratis, pluralis dan menekankan penghayatan hidup serta refleksi untuk menjadi manusia yang utuh, yaitu generasi muda yang tidak hanya pandai tetapi juga bermoral dan etis, dapat hidup dalam suasana demokratis satu dengan lain, dan menghormati hak orang lain.

Selain itu, perlu kiranya memperhatikan kurikulum sebagai proses. Ada empat hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengembangkan kurikulum sebagai proses ini, yaitu;

- a. posisi siswa sebagai subjek dalam belajar,
- b. cara belajar siswa yang ditentukan oleh latar belakang budayanya,
- c. lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi siswa adalah *entry behaviour* kultur siswa,

4. lingkungan budaya siswa adalah sumber belajar.

Dalam konteks deskriptif ini, kurikulum pendidikan mestilah mencakup subjek seperti: toleransi, tema-tema tentang perbedaan etnokultural dan agama: bahaya diskriminasi: penyelesaian konflik dan mediasi: HAM; demokrasi dan pluralitas; kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan (Mohammed Arkoun, 2001, hlm. 30).

Bentuk kurikulum dalam pendidikan agamahendaknya tidak lagi ditujukan pada siswa secara individu menurut agama yang dianutnya, melainkan secara kolektif dan berdasarkan kepentingan

bersama. Bila selama ini setiap siswa memperoleh pelajaran agama sesuai dengan agamanya, maka diusulkan agar lebih baik bila setiap siswa SMP dan SMA memperoleh materi agama yang sama, yaitu berisi tentang sejarah pertumbuhan semua agama yang berkembang di Indonesia. Sedangkan untuk SD diganti dengan pendidikan budi pekerti yang lebih menanamkan nilai-nilai moral kemanusiaan dan kebaikan secara universal. Dengan materi seperti itu, di samping siswa dapat menentukan agamanya sendiri (bukan berdasarkan keturunan), juga dapat belajar memahami pluralitas berdasarkan kritisnya, mengajarkan keterbukaan, toleran, dan tidak eksklusif, tapi inklusif (Darmaningtyas, 1999, hlm. 165).

Amin Abdullah menyarankan perlunya rekonstruksi pendidikan sosial-keagamaan untuk memperteguh dimensi kontrak sosial-keagamaan dalam pendidikan agama (Amin Abdullah, 1999, hlm. 13-16). Dalam hal ini, kalau selama ini praktek di lapangan, pendidikan agamamasih menekankan sisi keselamatan yang dimiliki dan didambakan oleh orang lain di luar diri dan kelompoknya sendiri. Pendidikan agama perlu direkonstruksi kembali, agar lebih menekankan proses edukasi sosial, tidak semata-mata individual dan untuk memperkenalkan konsep *social-contract*. Sehingga pada diri peserta didik tertanam suatu keyakinan, bahwa kita semua sejak semula memang berbeda-beda dalam banyak hal, lebih-lebih dalam bidang akidah, iman, credo, tetapi demi untuk menjaga keharmonisan, keselamatan, dan kepentingan kehidupan bersama, mau tidak mau, kita harus rela untuk menjalin kerjasama (*cooperation*) dalam bentuk kontrak sosial antar sesama kelompok warga masyarakat (Said Aqiel Siradj, 1999, hlm. 51).

Pendek kata, agar maksud dan tujuan pendidikan agama berbasis pluralisme dapat tercapainya pendidikan agama, kurikulumnya harus didesain sedemikian rupa dan *favourable* untuk semua tingkatan dan jenjang pendidikan. Namun demikian, pada level sekolah dasar dan menengah adalah paling penting, sebab pada tingkatan ini, sikap dan perilaku peserta didik masih siap dibentuk. Perlu diketahui, suatu kurikulum tidak dapat diimplementasikan tanpa adanya keterlibatan, pembuatan dan kerjasama secara langsung antara para pembuat kurikulum, penulis *text books* dan guru.

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh pembuat kurikulum, penulis *text books* dan guru untuk mengembangkan kurikulum pendidikan agama berbasis pluralisme di Indonesia, adalah sebagai berikut;

Pertama, mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam seperti saat ini kepada filosofi yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan. Untuk tingkat dasar, filosofi konservatif seperti esensialisme dan perenialisme haruslah dapat diubah ke filosofi yang lebih menekankan pendidikan sebagai upaya mengembangkan kemampuan kemanusiaan peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat bangsa, dan dunia. Filosofi kurikulum yang progresif seperti humanisme, progresifme, dan rekonstruksi sosial dapat dijadikan landasan pengembangan kurikulum.

Kedua, teori kurikulum tentang konten (*curriculum content*) haruslah berubah dari teori yang mengartikan konten sebagai aspek substantif yang berisikan fakta, teori, generalisasi kepada pengertian yang mencakup pula nilai, moral, prosedur, dan keterampilan yang harus dimiliki generasi muda.

Ketiga, teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik tidak boleh lagi hanya mendasarkan diri pada teori psikologi belajar yang bersifat individualistik dan menempatkan siswa dalam suatu kondisi *value free*, tetapi harus pula didasarkan pada teori belajar yang menempatkan siswa sebagai makhluk sosial, budaya, politik, dan hidup sebagai anggota aktif masyarakat, bangsa, dan dunia.

Keempat, proses belajar yang dikembangkan untuk siswa haruslah pula berdasarkan proses yang memiliki tingkat isomorphism yang tinggi dengan kenyataan sosial. Artinya, proses belajar yang mengandalkan siswa belajar individualistis harus ditinggalkan dan diganti dengan cara belajar berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam suatu situasi positif. Dengan cara demikian maka

perbedaan antar-individu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan kelompok dan siswa terbiasa hidup dengan berbagai keragaman budaya, sosial, intelektualitas, ekonomi, dan aspirasi politik.

Kelima, evaluasi yang digunakan haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik, sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. Alat evaluasi yang digunakan haruslah beragam sesuai dengan sifat tujuan dan informasi yang ingin dikumpulkan. Penggunaan alternatif assesment (portfolio, catatan, observasi, wawancara) dapat digunakan.

Di samping perlunya memperhatikan langkah-langkah itu, untuk menuju sebuah Pendidikan agama yang menghargai pluralisme, sebenarnya selain aspek kurikulum yang harus didesain, sebagaimana telah penulis uraikan, aspek pendekatan dan pengajaran. Pola-pola lama dalam pendekatan atau pengajaran agama harus segera dirubah dengan model baru yang lebih mengalir dan komunikatif. Aspek perbedaan harus menjadi titik tekan dari setiap pendidik. Pendidik harus sadar betul bahwa masing-masing peserta didik merupakan manusia yang unik (*human unike*), karena itu tidak boleh ada penyeragaman-peyeragaman. Dalam prespektif ini, pendidikan agamayang memberikan materi kajian perbandingan agama dan nilai-nilai prinsip Islam seperti; toleransi, keadilan, kebebasan dan demokrasi.

5. Menampilkan Islam Toleran Melalui Kurikulum

Mengembangkan sikap pluralisme pada peserta didik di era sekarang ini, adalah mutlak segera dilakukan oleh seluruh pendidikan agama di Indonesia demi kedamaian sejati. Pendidikan agama perlu segera menampilkan ajaran-ajaran Islam yang toleran melalui kurikulum pendidikannya dengan tujuan dan menitikberatkan pada pemahaman dan upaya untuk bisa hidup dalam konteks perbedaan agama dan budaya, baik secara individual maupun secara kelompok dan tidak terjebak pada primordialisme dan eksklusifisme kelompok agama dan budaya yang sempit (Sumartana, 2001, hlm. 28). Sehingga sikap-sikap pluralisme itu akan dapat ditumbuhkembangkan dalam diri generasi muda kita melalui dimensi-dimensi pendidikan agama dengan memperhatikan hal-hal seperti berikut:

- a. Pendidikan agama seperti fiqih, tafsir tidak harus bersifat linier, namun menggunakan pendekatan muqaron. Ini menjadi sangat penting, karena anak tidak hanya dibekali pengetahuan atau pemahaman tentang ketentuan hukum dalam fiqih atau makna ayat yang tunggal, namun juga diberikan pandangan yang berbeda. Tentunya, bukan sekedar mengetahui yang berbeda, namun juga diberikan pengetahuan tentang mengapa bisa berbeda.
- b. Untuk mengembangkan kecerdasan sosial, siswa juga harus diberikan pendidikan lintas agama. Hal ini dapat dilakukan dengan program dialog antar agama yang perlu diselenggarakan oleh lembaga pendidikan agama. Sebagai contoh, dialog tentang “puasa” yang bisa menghadirkan para bikhsu atau agamawan dari agama lain. Program ini menjadi sangat strategis, khususnya untuk memberikan pemahaman kepada siswa bahwa ternyata puasa itu juga menjadi ajaran saudara-saudara kita yang beragama Budha. Dengan dialog seperti ini, peserta didik diharapkan akan mempunyai pemahaman khususnya dalam menilai keyakinan saudara-saudara kita yang berbeda agama. karena memang pada kenyataanya di luar Islampun ada keselamatan.
- c. Untuk memahami realitas perbedaan dalam beragama, lembaga-lembaga pendidikan agama bukan hanya sekedar menyelenggarakan dialog antar agama, namun juga menyelenggarakan program road show lintas agama. Program road show lintas agama ini adalah program nyata untuk menanamkan kepedulian dan solidaritas terhadap komunitas agama lain. Hal ini dengan cara mengirimkan siswa-siswa untuk ikut kerja bhakti membersihkan gereja, wihara ataupun tempat suci lainnya. Kesadaran pluralitas bukan sekedar hanya memahami keberbedaan, namun juga harus ditunjukkan dengan sikap

konkrit bahwa diantara kita sekalipun berbeda keyakinan, namun saudara dan saling membantu antar sesama.

- d. Untuk menanamkan kesadaran spiritual, pendidikan agama perlu menyelenggarakan program seperti *spiritual work camp* (SWC), hal ini bisa dilakukan dengan cara mengirimkan siswa untuk ikut dalam sebuah keluarga selama beberapa hari, termasuk kemungkinan ikut pada keluarga yang berbeda agama. Siswa harus melebur dalam keluarga tersebut. Ia juga harus melakukan aktifitas sebagaimana aktifitas keseharian dari keluarga tersebut. Jika keluarga tersebut petani, maka ia harus pula membantu keluarga tersebut bertani dan sebagainya. Ini adalah suatu program yang sangat strategis untuk meningkatkan kepekaan serta solidaritas sosial. Pelajaran penting lainnya, adalah siswa dapat belajar bagaimana memahami kehidupan yang beragam. Dengan demikian, siswa akan mempunyai kesadaran dan kepekaan untuk menghargai dan menghormati orang lain.
- e. Pada bulan Ramadhan, adalah bulan yang sangat strategis untuk menumbuhkan kepekaan sosial pada anak didik. Dengan menyelenggarakan "program sahur on the road", misalnya. Karena dengan program ini, dapat dirancang sahur bersama antara siswa dengan anak-anak jalanan. Program ini juga memberikan manfaat langsung kepada siswa untuk menumbuhkan sikap kepekaan sosial, terutama pada orang-orang di sekitarnya yang kurang mampu.
- f. Selain beberapa hal di atas, perlu kiranya mengajarkan materi Aqidah Inklusif. Sebagaimana telah banyak diketahui umat Islam, aqidah berasal dari bahasa Arab yang berarti "kepercayaan", maksudnya ialah hal-hal yang diyakini oleh orang-orang beragama. Dalam Islam, aqidah selalu berhubungan dengan iman. Aqidah adalah ajaran sentral dalam Islam dan menjadi inti risalah Islam melalui Muhammad. Tegaknya aktivitas keislaman dalam hidup dan kehidupan seseorang itulah yang dapat menerangkan bahwa orang itu memiliki akidah. Masalahnya karena iman itu bersegi teoritis dan ideal yang hanya dapat diketahui dengan bukti lahiriah dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, terkadang menimbulkan problem tersendiri ketika harus berhadapan dengan keimanan dari orang yang beragama lain. Apalagi persoalan iman ini, juga merupakan inti bagi semua agama, jadi bukan hanya milik Islam saja. Maka, tak heran jika kemudian muncul persoalan truth claim dan salvation claim diantara agama-agama, yang sering berakhir dengan konflik antar agama.

Untuk mengatasi persoalan seperti itu, pendidikan agama melalui ajaran aqidahnya, perlu menekankan pentingnya persaudaraan umat beragama. Pelajaran aqidah, bukan sekedar menuntut pada setiap peserta didik untuk menghafal sejumlah materi yang berkaitan dengannya, seperti iman kepada Allah swt, nabi Muhamad saw, dll. Tetapi sekaligus, menekankan arti pentingnya penghayatan keimanan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, aqidah harus berbuntut dengan amal perbuatan yang baik atau Akhlak Karimah pada peserta didik. Memiliki akhlak yang baik pada Tuhan, alam dan sesama umat manusia.

Pendidikan agama harus sadar, bahwa kerusuhan-kerusuhan bernuansa SARA seperti yang sering terjadi di Indonesia ini adalah akibat ekspresi keberagamaan yang salah dalam masyarakat kita, seperti ekspresi keberagamaan yang masih bersifat eksklusif dan monolitik serta fanatisme untuk memonopoli kebenaran secara keliru. Celakanya, ekspresi keagamaan seperti itu merupakan hasil dari pendidikan agama. Pendidikan agama dipandang masih banyak memproduksi manusia yang memandang golongan lain (tidak seakidah) sebagai musuh. Maka di sinilah perlunya menampilkan pendidikan agama yang fokusnya adalah bukan semata kemampuan ritual dan keyakinan tauhid, melainkan juga akhlak sosial dan kemanusiaan.

Pendidikan agama, merupakan sarana yang sangat efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai atau aqidah inklusif pada peserta didik. Perbedaan agama di antara peserta didik bukanlah menjadi penghalang untuk bisa bergaul dan bersosialisasi diri. Justru pendidikan agama dengan peserta didik berbeda agama, dapat dijadikan sarana untuk menggali dan menemukan nilai-nilai keagamaan pada agamanya masing-masing sekaligus dapat mengenal tradisi agama orang lain.

Target kurikulum Agama Islam harus berorientasi pada akhlak. Bahkan dalam pengajaran akidahnya, kalau perlu semua peserta didik disuruh merasakan jadi orang yang beragama lain atau atheis sekalipun. Tujuannya adalah bukan untuk “konfersi”, melainkan dalam rangka agar mereka mempertahankan iman. Sebab, akidah itu harus dipahami sendiri, bukan dengan cara taklid, taklid tidak dibenarkan dalam persoalan akidah. Selain itu, pada masalah-masalah syari’ah. Dalam persoalan syariah, sering umat Islam juga berbeda pendapat dan bertengkar. Maka dalam hal ini pendidikan agama perlu memberikan pelajaran fiqh muqarran (fiqh perbandingan) untuk memberikan penjelasan adanya perbedaan pendapat dalam Islam, dan semua pendapat itu sama-sama memiliki argumen, dan wajib bagi kita untuk menghormati. Sekolah tidak menentukan salah satu mazhab yang harus diikuti oleh peserta didik, pilihan mazhab terserah kepada mereka masing-masing.

Melalui suasana pendidikan seperti itu, tentu saja akan terbangun suasana saling menemani dalam kehidupan beragama secara dewasa, tidak ada perbedaan yang berarti diantara perbedaan manusia yang pada realitasnya memang berbeda. Tidak dikenal superior ataupun inferior, serta memungkinkan terbentuknya suasana dialog yang memungkinkan untuk membuka wawasan spritualitas baru tentang keagamaan dan keimanan masing-masing.

Pendidikan agama harus memandang iman (*faith*) yang dimiliki oleh setiap pemeluk agama bersifat dialogis, artinya iman itu bisa didialogkan antara Tuhan dan manusia, dan antara sesama manusia. Iman merupakan pengalaman kemanusiaan ketika berintim dengan-Nya, dengan begitu, bahwa yang menghayati dan menyakini iman itu adalah manusia, dan bukannya Tuhan, dan pada tingkat tertentu iman itu bisa didialogkan oleh manusia, antar sesama manusia dan dengan menggunakan bahasa manusia (H. A. R. Tilar, 2001, hlm. 83).

Tujuan untuk menumbuhkan saling menghormati kepada semua manusia yang memiliki iman berbeda atau mazhab berbeda dalam beragama, salah satunya bisa diajarkan lewat pendidikan akidah yang inklusif. Dalam pembelajarannya, tentu saja memberikan perbandingan dengan akidah yang dimiliki oleh agama lain (perbandingan agama). Pendidikan akidah seperti itu mensyaratkan adanya fairly and sensitively dan bersikap terbuka (open minded). Tentu saja, pengajaran agama seperti itu, sekaligus menuntut untuk bersikap objektif sekaligus subjektif. Objektif, maksudnya sadar bahwa membicarakan banyak iman secara fair itu tanpa harus meminta pertanyaan mengenai benar atau validnya suatu agama. Subjektif berarti sadar bahwa pengajaran seperti itu sifatnya hanyalah untuk mengantarkan setiap peserta didik memahami dan merasakan sejauh mana keimana tentang suatu agama itu dapat dirasakan oleh orang yang mempercayainya (Douglas Mc. Allen, 1978, 139).

Melalui pengajaran akidah inklusif seperti itu, tentu saja bukan untuk membuat suatu kesamaan pandangan, apalagi keseragaman, karena hal itu adalah sesuatu yang absurd dan agak mengkhianati tradisi suatu agama. yang dicari adalah mendapatkan titik-titik pertemuan yang dimungkinkan secara teologis oleh masing-masing agama. setiap agama mempunyai sisi ideal secara filosofis dan teologis, dan inilah yang dibanggakan penganut suatu agama, serta yang akan menjadikan mereka tetap bertahan, jika mereka mencari dasar rasional atas keimanan mereka. Akan tetapi, agama juga mempunyai sisi real, yaitu suatu agama menyejarah dengan keagungan atau kesalahan-kesalahan yang biasa dinilai dari sudut pandang sebagai sesuatu yang memalukan. Oleh karena itu, suatu dialog dalam perbandingan agama harus selalu mengandalkan kerendahan hati untuk membandingkan konsep-konsep ideal yang dimiliki agama lain yang hendak dibandingkan, dengan demikian akan dapat terhindar dari suatu penilai standar ganda dalam melihat agama lain (Yayah Hisbiyah, 2000, hlm. 81).

CONCLUSION

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah pendidikan yang berbasis keragaman budaya (etnokultural) akan berusaha memelihara dan berupaya menumbuhkan pemahaman yang inklusif pada peserta didik. Dengan suatu orientasi untuk memberikan

penyadaran terhadap para peserta didiknya akan pentingnya saling menghargai, menghormati dan bekerja sama dengan agama-agama lain. Hal ini sejalan dengan tujuan akhir pendidikan yaitu perubahan perilaku dan sikap serta kualitas seseorang, maka pengajaran harus berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak sekedar memberi informasi atau pengetahuan melainkan harus menyentuh hati, sehingga akan mendorongnya dapat mengambil keputusan untuk berubah. Pendidikan agama, dengan demikian, di samping bertujuan untuk memperteguh keyakinan pada agamanya, juga harus diorientasikan untuk menanamkan empati, simpati dan solidaritas terhadap sesama. Maka, dalam hal ini, semua materi buku-buku yang diajarkannya tentunya harus menyentuh tentang keragaman budaya (etnokultural). Dari sinilah kemudian kita akan mengerti urgensinya untuk menyusun bentuk kurikulum pendidikan agama berbasis keragaman budaya (etnokultural).

Berdasarkan penyampaian berbagai gagasan dan pemikiran di atas, maka dapat diusulkan saran sebagai berikut: *pertama*, keragaman budaya (etnokultural) dapat digunakan sebagai alternatif dalam merumuskan kebijakan (policy) dalam pendidikan agama; dan *kedua*, pendidik dan Lembaga Pendidikan dapat berpegang pada konsep keragaman budaya (etnokultural) dalam merumuskan sekaligus mempraktekan pengajaran pendidikan agama islam keada peserta didiknya.

REFERENCES

- Abdullah, Taufik dan M Rusli Karim, (ed.), *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, Yogyakarta; Tiara Wacana Yogyakarta, 2019.
- Abdullah, Taufik dan M Rusli Karim, (ed.), *Sejarah dan Masyarakat*, Jakarta; Pustaka Firdaus, 2019.
- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Ahmad, Amin, *Dhuha al-Islam*, Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Ainurrofiq, Dawan, *Emoh Sekolah*, Yogyakarta: Galang Perss, 2003.
- Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*, Yogyakarta: 1996, Cet. ke-1.
- Aqiel Siradj, Said, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2019.
- Arkoun, Muhammad, *Islam Kontemporer: Menuju Dialog Antar Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Atang Abdul Hakim, & Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Azra, Azyumardi, *Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisme Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2019.
- Babbie, Earl, *The Practice of Social Research*, California: Wadsworth Publishing Co., 1986.
- Baried, St. Baroroh dkk, *Pengantar Teori Filologi*, Yogyakarta: BPPF, 1994.
- Barnadib, Imam, *Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode*, Yogyakarta: Andi Offset, 2019.
- Basri, Ghazali, *An Integrated Education System In A Multifaith and Multi-Cultural Country*, Malaysia: Muslim Youth Movement Malaysia, 1991.
- Darmaningtyas, *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis*, Yogyakarta: Inspeal Ahimsa Karya Perss, 1999.
- Durkheim, É., Wilson, E. K., & Schnurer, H, *Moral Education: A Study in the Theory and Application of the Sociology of Education*. Free Press of Glencoe, 1961.
- Hamdi Zaquzuq. *Dirasat fi al-Falsafah al-Haditsah*. Dar al-Fikr al-Arabi: Cairo. Cet. 3, 1993.
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta, Prenada, 2011.
- Hasan, S. Hasan, "Pendekatan Multikultural untuk Penyempurnaan Kurikulum Nasional," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi Januari-November, 510–524, 2000

- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 2016.
- Hisbiyah, Yayah, at.al., *Mencari Pendidikan Yang Menghargai Pluralisme, Dalam Membangun Masa Depan Anak-anak Kita*, Yogyakarta: Knisius, 2010.
- I. M. Bochenski. *La Philosophie Contemropaine En Europe* diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab, dengan judul: *Al-Falsafah al-Mu'aşirah Fī Urubbā* oleh: Ezzat Qarni. 'Ālam al-Ma'rifah: Kuwait, edisi: 165.
- Kiram, Yusuf, *Tārīkh al-Falsafah al-Hadīthah*, Dār al-Ma'ārif, Kairo, 1978.
- M. Muqtafa, Khoirul, *Paradigma Multikultural*. Jakarta: Sinar Harapan, 2014.
- Max Weber dalam edisi Arab berjudul: *al-Akhlāq al-Brutistantiyyah wa al-Rūḥ al-Ra's al-Māliyyah*, dalam 'Ālam al-Ma'rifah: Kuwait, edisi 309 tahun 2004 yang diedit oleh: J. Timmons Roberts dan Amy Hite.
- Mc. Allen, Douglas, *Structure and Creativity in Religion*, The Houge The Netherlands: Moutan Publisher, 1978.
- Milton D. Hunnex, *Peta Filsafat: Pendekatan Kronologis dan Tematis*. Diterjemahkan oleh Zubair. Teraju: Jakarta. 2004.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhaimin, Abdul Mujib, dan Jusuf Mudzakkir, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet. 2, 2017.
- Nasr, Sayyed Husen, *Menjelajah Dunia Modern*, (terj.) Hasti Tarekat, dari judul asli *A Young Muslim's Guide in The Modern World*, Bandung: Mizan, 1995.
- Palmer, Richard E, *Hermeneutics, Interpretation teori in scheleirmeder*, hedegger dan Gadamer, University Press, 1969.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2012.
- Rahman, Budi Munawar, *Budi, Islam Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2010.
- Robinson, Philip, *Beberapa Perpsektif Sosiologi Pendidikan*. Terjemahan: Hasan Basri, Jakarta: Penerbit Radjawali, 1986.
- Romdon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sachedina, Abdulaziz, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, Britain: The Falmer Press, 2002.
- Sayyed Husen Nasr, *Menjelajah Dunia Modern*, (terj.) Hasti Tarekat, dari judul asli *A Young Muslim's Guide in The Modern World*, Bandung: Mizan, 1995.
- Sihab, Alwi, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 2012.
- Smith, W. C. *Toward, Theology: Faith and the Comparative History of Religion*, London & Basingstoke: The Macmillan Press, 1981.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung, Kencana, 2010.
- Sumardi, Mulyanto, (ed.), *Penelitian Agama*, Jakarta: Sinar Harapan, 1982.
- Sumartana, at al., *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Suparlan, Parsudi, *Menuju Indonesia Baru*, Yogyakarta: Perhimpunan Indonesia Baru, Asosiasi Antropologi Indonesia, 2018.

Tilar, H. A. R., *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Tim IAIN Sunan Ampel Surabaya. *Pengantar Studi Islam*. Surabaya; IAIN Sunan Ampel Press Surabaya. 2002.

Ulya, Sumaryono, E, *Hermeneutika, Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Zaqquq, Hamdi, *Dirāsāt fī al-Falsafah al-Hadīthah*, Dār al-Fikr al-‘Arabī: Cairo. Cet. 3, 1993.